



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2025



<https://dinkes.pesisirselatan Kab.go.id>



dinkessessel



DINAS KESEHATAN_PESSEL



Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah SWT, karena izin dan hidayahNya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 telah dapat diselesaikan dan disusun. Penyusunan LKJ ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pertanggungjawaban (akuntabilitas) disamping beberapa keberhasilan serta kegagalan dan permasalahan dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya.

Selain itu, penyusunan LKJ juga bertujuan sebagai perwujudan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya bidang kesehatan dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (**good governance**).

Penyusunan LKj Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan guna peningkatan kualitas laporan ini.

Painan, 30 Juni 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST.MM
NIP. 19790810 200312 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi dan APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (good governace).

Penyusunan LKj Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran

strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten dan APBN.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021– 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi kedua. Misi pertama yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan dan misi kedua yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat”. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kesehatan Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional.
- MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
- TUJUAN 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- SASARAN1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat
- Tujuan 2,1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
- SASARAN 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026,

seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel. 1 berikut :

Tabel 1. 1
Capaian indikator sasaran strategis dinas kesehatan kab pesisir selatan tahun 2025

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2025		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	A (81)	A(80,81)*	99,77
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	91	91	100,00
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000KH	125	11700%	106,40
			Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	10	13	70,00
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persentase	6,50	6,40	101,54
Rata-Rata Capaian							95,54

Catatan : *) data capaian tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan pelaporan 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 30 Juni 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Agustina Rahmadani, SST,MM
NIP. 19790812 200312 2 006

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA	11
1.5 LANDASAN HUKUM	12
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025	16
2.2 RENCANA KERJA	19
2.3 PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA	26
3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA	27
3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025	28
BAB IV PENUTUP	83
4.1 KESIMPULAN	83
4.2 SARAN	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 struktur organisasi dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan	10
Gambar 3.1 data yang di upload di website	32
Gambar 3.2 dokumentasi penyerahan penghargaan kepada pegawai berprestasi.....	33
Gambar 3.3 sertifikat penghargaan tahun 2025	33
Gambar 3.4 penerimaan penghargaan peringkat daerah terbaik di kearsipan yang diserahkan oleh wakil bupati	34
Gambar 3.5 penerimaan penghargaan peringkat terbaik di kualifikasi informatif yang diserahkan oleh bupati pesisir selatan tahun 2025.....	34
Gambar 3.6 asistensi penyusunan laporan kinerja di bagian organisasi.....	35
Gambar 3.7 cover laporan kinerja tahun 2024 dan LHE.....	35
Gambar 3.8 rapat monitoring dan evaluasi.....	36
Gambar 3.9 Media sosial dinas kesehatan.....	36
Gambar 3.10 Penghargaa terbaik di kategori perangkat daerah "informatif"	37
Gambar 3.11 matriks tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2024	39
Gambar 3.12 dokumentasi pelaksanaan audit kematian ibu dan bayi.....	52
Gambar 3.13 prevalensi stunting kabupaten pesisir selatan tahun 2020-2025.....	70
Gambar 3.14 dokumentasi pelaksanaan evaluasi kasus stunting tahun 2025	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Capaian indikator sasaran strategis dinas kesehatan kab pesisir selatan tahun 2025	iv
Tabel 1.3 komposisi jumlah aparatur dinas kesehatan tahun 2025 menurut jenis kelamin	5
Tabel 1.4 komposisi jumlah aparatur dinas kesehatan tahun 2025 menurut pendidikan	8
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan tahun 2021-2026	18
Tabel 2.2 rencana kerja dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan tahun 2025.....	19
Tabel 2.3 sasaran strategis, indikator kinerja utama (iku) dan program pendukung dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan.....	20
Tabel 2.4 perjanjian kinerja dinas kesehatan tahun 2025	23
Tabel 2.5 revisi perjanjian kinerja dinas kesehatan tahun 2025	24
Tabel 2.6 program dan anggaran dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan tahun 2025.....	25
Tabel 3.1 klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan	27
Tabel 3.2 hasil pengukuran perjanjian kinerja eselon di dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan tahun 2025.....	27
Tabel 3.3 perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja ssaran strategis terrwujudnya pemerintahanyang akuntabel dan berkinerja tahun 2025.....	29
Tabel 3.4 perbandingan realisasi indikator kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	30
Tabel 3.5 perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis nasional.....	31
Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
Tabel 3.7 target dan realisasi inovasi dinas kesehatan tahun 2025	41
Tabel 3.8 perbandingan realisasi indikator kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	41
Tabel 3.9 perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	42
Tabel 3.10 analisis keberhasilan/kegagalan kinerja	42
Tabel 3.11 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	43
Tabel 3.12 jumlah kematian ibu per puskesmas kabupaten pesisir selatan tahun 2025.....	47
Tabel 3.13 perbandingan target dan realisasi capaian indikator sasaran strategis angka kematian ibu (aki)	48

Tabel 3.14 perbandingan realisasi indikator kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	49
Tabel 3.15 jumlah kematian ibu kabupaten pesisir selatan tahun 2022-2025	50
Tabel 3.16 perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	50
Tabel 3.17 perbandingan angka kematian ibu kabupaten pesisir selatan dengan provinsi dan nasional tahun 2025	53
Tabel 3.18 jumlah kematian ibu tahun 2021-2025 di kabupaten pesisir selatan.....	54
Tabel 3.19 Analisis atas efisiensi sumber daya	55
Tabel 3.20 Angka kematian bayi kabupaten pesisir selatan tahun 2025	59
Tabel 3.21 jumlah kematian bayi per puskesmas kabupaten pesisir selatan tahun 2025.....	60
Tabel 3.22 Angka kematian bayi kabupaten pesisir selatan tahun 2022-2025	61
Tabel 3.23 perbandingan realisasi indikator kinerja tahun lalu dan beberapa terakhir	62
Tabel 3.24 perbandingan angka kematian bayi kabupaten pesisir selatan dengan provinsi dan nasional tahun 2025	63
Tabel 3.25 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	64
Tabel 3.26 target dan realisasi prevalensi stunting tahun 2025 kabupaten pesisir selatan	69
Tabel 3.27 prevalensi stunting kabupaten pesisir selatan tahun 2022-2025	70
Tabel 3.28 trend prevalensi stunting per kecamatan tahun 2023-2025	70
Tabel 3.29 perbandingan realisasi indikator kinerja target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	71
Tabel 3.30 perbandingan persentase prevalensi stunting kabupaten pesisir selatan dengan standar provinsi dan nasional tahun 2025.....	72
Tabel 3.31 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	74
Tabel 3.32 anggaran dan realisasi yang menunjang sasaran strategis dinas kesehatan tahun 2025.....	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 komposisi jumlah aparatur dinas kesehatan tahun 2025 menurut jenis kelamin	6
Grafik 1.2 Jumlah asn menurut pendidikan.....	9
Grafik 3.1 perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja angka kematian ibu	48
Grafik 3.2 angka kematian ibu tahun 2022-2025	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan juga merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, laporan Kinerja Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya laporan Kinerja Dinas Kesehatan adalah untuk memberikan gambaran Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawaban serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian atau target sasaran tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan LKj Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2025.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 bagi upaya- upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan
 - 2.3 Kelompok Fungsional Perencana
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 3.1 Kelompok Fungsional
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 4.1 Kelompok Fungsional
5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 5.1 Kelompok Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 6.1 Kelompok Fungsional
7. UPTD

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 2.401 orang yang terdiri atas:

1. PNS sebanyak 840 orang yang terdiri atas 90 orang laki-laki dan 750 orang Perempuan;
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 813 orang yang terdiri atas 121 orang laki-laki dan 692 orang perempuan; dan
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 748 orang yang terdiri atas 139 orang laki-laki dan 609 orang perempuan.

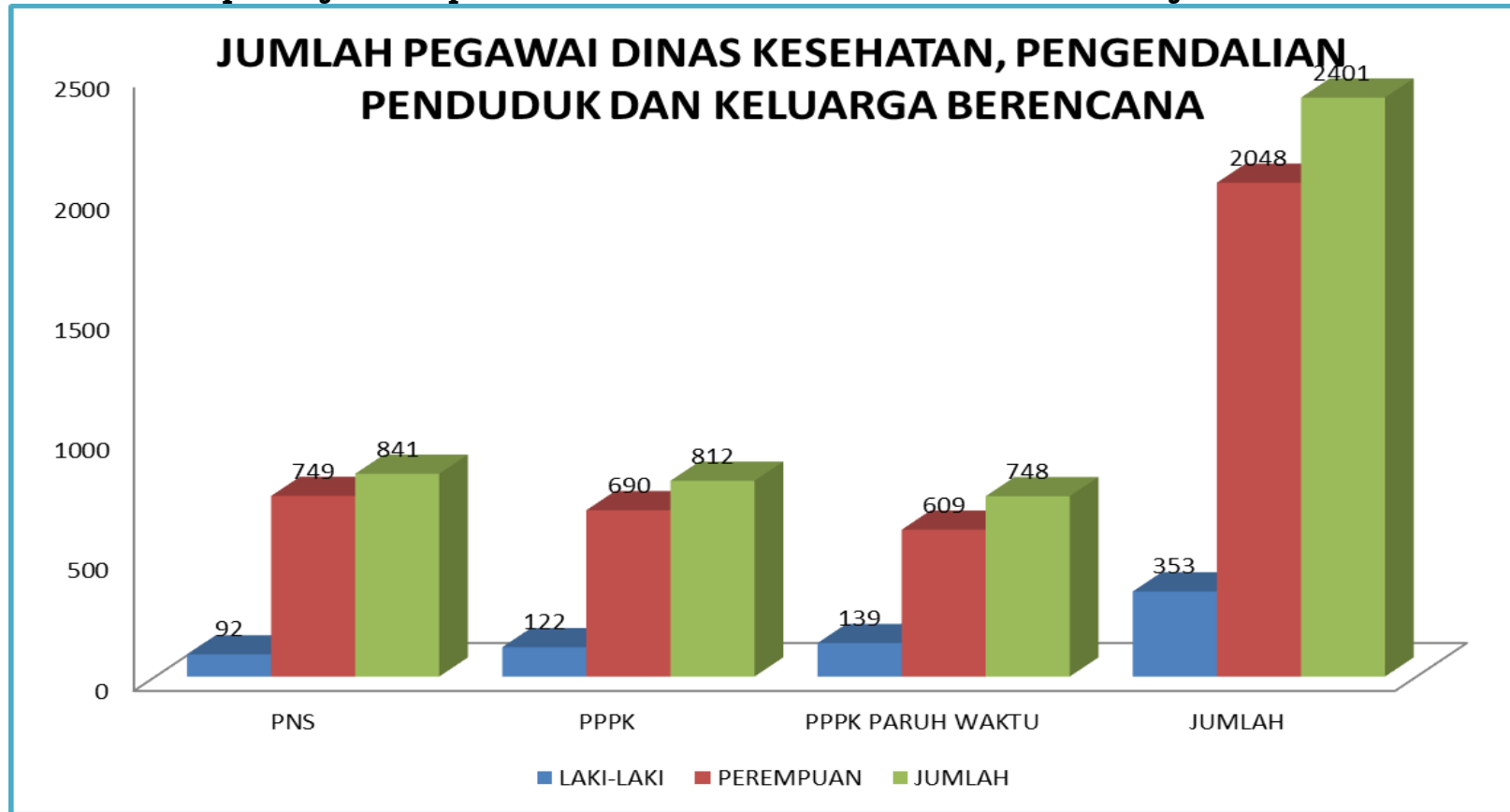
Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 berikut :

TABEL 1. 2 KOMPOSISI JUMLAH APARATUR DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 MENURUT JENIS KELAMIN

TAHUN	No	ASN										TOTAL
			PNS			PPPK			PPPK PARUH WAKTU			
		INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
2025	1	DINAS KESEHATAN	17	48	65	6	17	23	12	7	19	107
	2	BBB	1	27	28	5	36	41	4	12	16	85
	3	TARUSAN	1	34	35	5	37	42	7	14	21	98
	4	ASAM KUMBANG	2	14	16	3	36	39	1	4	5	60
	5	KOTO BERAPAK	3	24	27	3	24	27	4	29	33	87
	6	PASAR BARU	2	43	45	4	22	26	4	21	25	96
	7	SALIDO	2	58	60	4	21	25	5	20	25	110
	8	LUMPO	2	20	22	3	23	26	1	11	12	60
	9	PASAR KUOK	2	28	30	4	32	36	2	13	15	81
	10	IV KOMU	2	15	17	4	25	29	4	15	19	65
	11	SURANTIH	3	53	56	6	34	40	17	81	98	194
	12	KAYU GADANG	1	23	24	5	33	38	3	29	32	94
	13	KAMBANG	7	57	64	2	26	28	4	33	37	129
	14	KOTO BARU	7	33	40	4	23	27	2	22	24	91
	15	BALAI SELASA	6	52	58	7	27	34	3	18	21	113
	16	AIR HAJI	6	57	63	6	20	26	5	50	55	144
	17	INDERAPURA	6	32	38	3	32	35	5	25	30	103
	18	AIRPURA	2	18	20	4	35	39	1	15	16	75
	19	TAPAN	1	18	19	6	31	37	6	15	21	77
	20	RAHUL	1	12	13	3	38	41	2	7	9	63
	21	TANJUNG BERINGIN	4	27	31	5	25	30	5	21	26	87
	22	TANJUNG MAKMUR	4	19	23	7	29	36	5	19	24	83
	23	RSUD TAPAN	8	38	46	22	66	88	38	127	165	299
		TOTAL	90	750	840	121	692	813	140	608	748	2401

Sumber: SDMK dinas kesehatan tahun 2025

Grafik 1.1
komposisi jumlah aparatur dinas kesehatan tahun 2025 menurut jenis kelamin



Sumber: SDMK Dinas Kesehatan tahun 2025

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. PNS dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 21 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 349 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya manusia, pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 440 orang, SMA sebanyak 24 orang dan SD 1 orang;

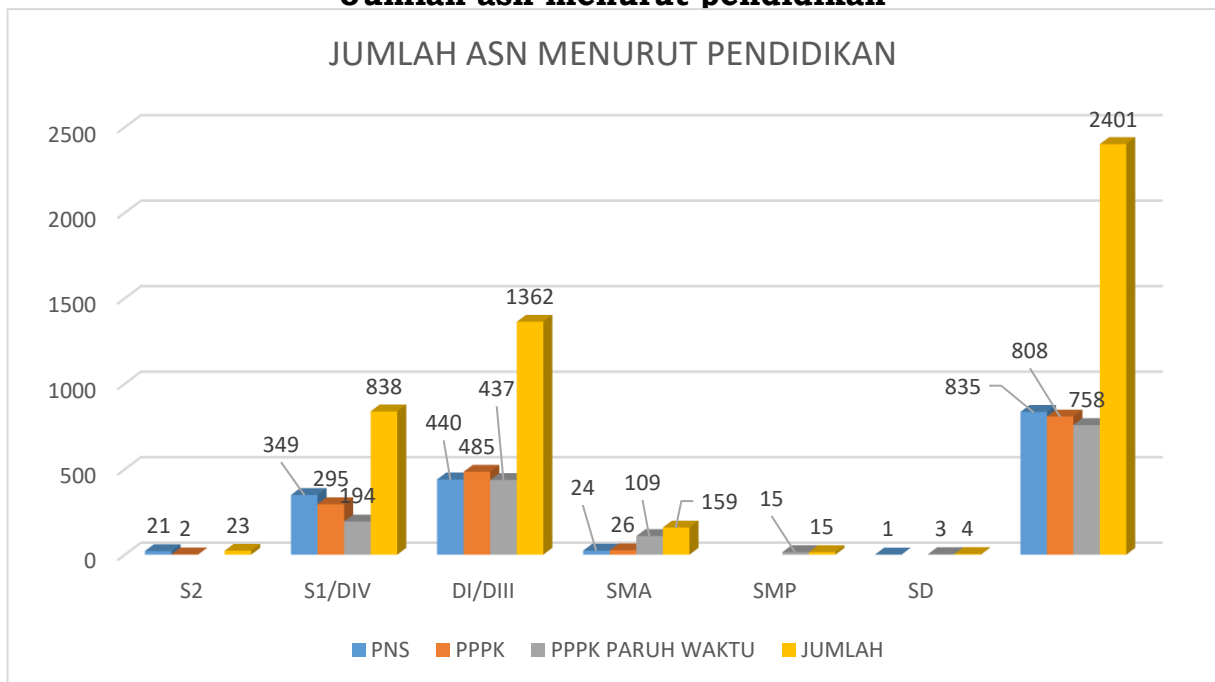
b. PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 295 orang, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 485 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 26 orang mendominasi jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia; dan

c. PPPK Paruh waktu jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 194 orang, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 437 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 109 orang, jenjang pendidikan SMP sebanyak 15 orang dan jenjang pendidikan SD sebanyak 3 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Grafik 1.2 berikut

TABEL 1. 3 KOMPOSISI JUMLAH APARATUR DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 MENURUT PENDIDIKAN

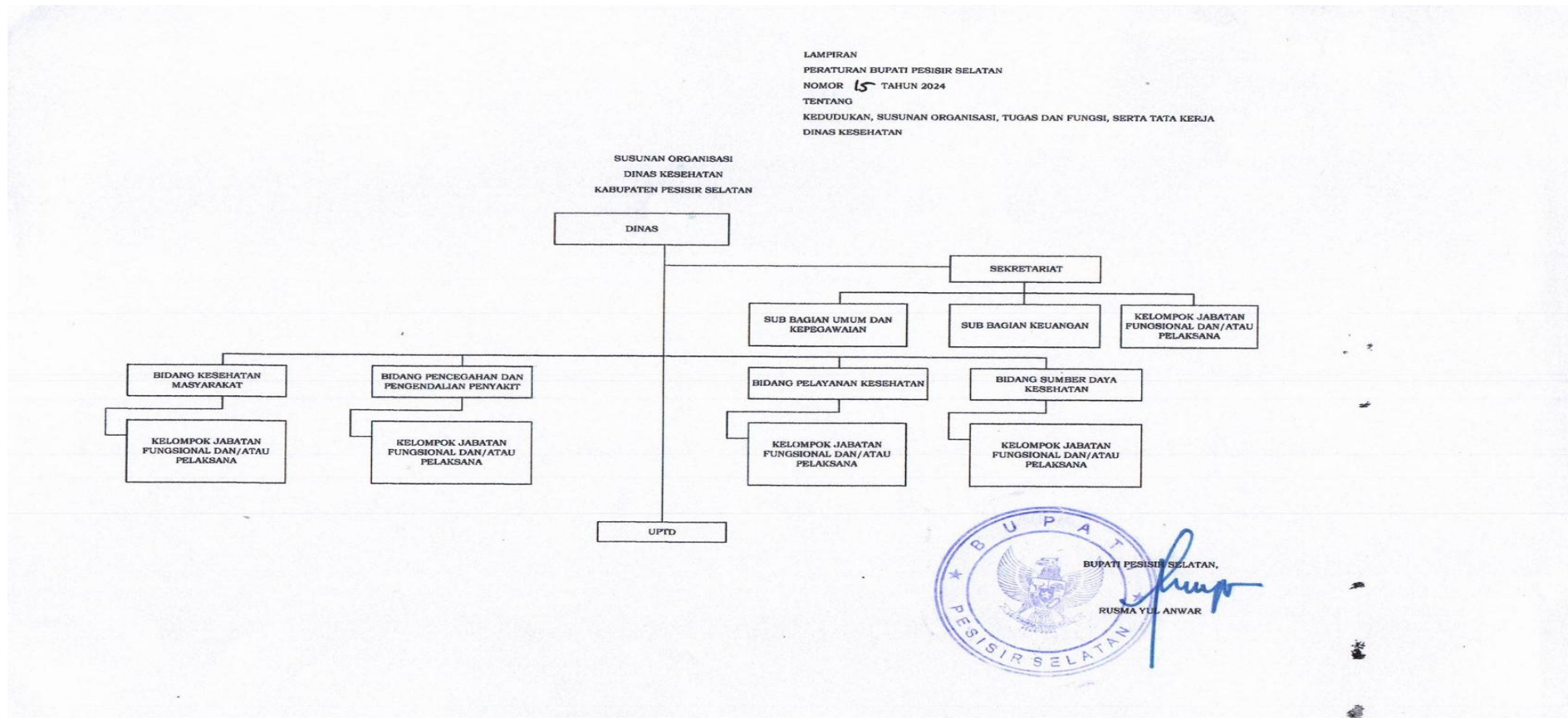
TAHUN	No	INSTANSI	ASN																				TOTAL	
			PNS							PPPK							PPPK PARUH WAKTU							
			S2	S1	DIV	DIII	SMA	SMP	SD	S2	S1	DIV	DIII	SMA	SMP	SD	S2	S1	DIV	DIII	SMA	SMP		SD
2025	1	DINAS KESEHATAN	12	28	3	16	6	0	0	0	14	1	3	5	0	0	0	7	2	3	6	1	0	107
	2	BBB	0	7	3	17	1	0	0	0	14	2	24	1	0	0	0	2	0	10	2	2	0	85
	3	TARUSAN	0	7	3	25	0	0	0	0	7	5	29	1	0	0	0	3	0	10	6	2	0	98
	4	ASAM KUMBANG	0	5	0	11	0	0	0	0	10	3	25	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	60
	5	KOTO BERAPAK	0	8	5	14	0	0	0	0	4	3	19	1	0	0	0	3	2	21	6	1	0	87
	6	PASAR BARU	2	16	3	23	1	0	0	0	12	0	13	1	0	0	0	7	0	15	3	0	0	96
	7	SALIDO	0	17	12	30	1	0	0	0	10	1	13	1	0	0	0	4	2	13	6	0	0	110
	8	LUMPO	0	8	5	8	1	0	0	0	4	2	19	1	0	0	0	1	0	9	2	0	0	60
	9	PASAR KUOK	0	6	10	13	1	0	0	1	9	4	21	1	0	0	0	2	2	8	2	1	0	81
	10	IV KOMU	0	8	6	3	0	0	0	0	4	1	24	0	0	0	0	1	0	13	4	1	0	65
	11	SURANTIH	0	18	7	33	0	0	0	0	15	1	23	1	0	0	0	21	2	62	10	0	1	194
	12	KAYU GADANG	0	9	0	15	0	0	0	0	10	5	22	1	0	0	0	11	0	20	1	0	0	94
	13	KAMBANG	1	14	6	41	2	0	0	0	11	2	14	1	0	0	0	8	1	25	3	0	0	129
	14	KOTO BARU	0	8	9	21	2	0	0	0	6	0	20	1	0	0	0	3	0	20	1	0	0	91
	15	BALAI SELASA	1	14	5	36	2	0	0	0	8	3	22	1	0	0	0	5	0	13	3			113
	16	AIR HAJI	1	20	3	37	1	0	1	0	5	2	18	1	0	0	0	3	3	44	3	0	2	144
	17	INDERAPURA	0	6	4	25	3	0	0	0	12	2	20	1	0	0	0	8	0	20	2	0	0	103
	18	AIRPURA	0	7	3	10	0	0	0	0	10	6	23	0	0	0	0	1	4	10	1	0	0	75
	19	TAPAN	2	4	1	12	0	0	0	0	13	1	22	1	0	0	0	9	1	6	1	4	0	77
	20	RAHUL	0	2	2	9	0	0	0	0	13	6	22	0	0	0	0	1	1	5	2	0	0	63
	21	TANJUNG BERINGIN	1	9	1	17	3	0	0	0	8	4	17	1	0	0	0	3	1	19	3	0	0	87
	22	TANJUNG MAKMUR	0	9	0	14	0	0	0	0	12	2	22	0	0	0	0	4	0	15	3	2	0	83
	23	RSUD TAPAN	1	26	2	10	0	0	0	1	24	4	50	4	0	0	0	58	7	73	38	1	0	299
		TOTAL	21	256	93	440	24	0	1	2	235	60	485	26	0	0	0	166	28	437	109	15	3	2401

Grafik 1.2
Jumlah asn menurut pendidikan



Sumber : SDM Kesehatan Dinas Kesehatan tahun 2025

GAMBAR 1. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



SUMBER : BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Merujuk pada identifikasi permasalahan Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Telaah RTRW Kabupaten Pesisir Selatan, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yakni sebagai berikut :

1. Masih adanya kematian ibu/maternal dan kematian bayi/neonatal yang berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat
2. Masih adanya balita dengan status gizi kurang dan stunting.
3. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.
4. Masih rendahnya kualitas dan akses sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat.
5. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
6. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
7. Belum optimalnya sumber daya kesehatan.
8. Belum optimalnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat berbasis individu, keluarga risti dan kelompok masyarakat resiko tinggi terhadap masalah kesehatan.

9. Belum optimalnya dukungan manajemen Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan.
10. Belum optimalnya kompetensi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas.
11. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum optimal dan kurang memenuhi standard.
12. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
13. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
14. Belum maksimalnya kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

1.5 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s/d 2026.

13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

14.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan laporan kinerja/LAKIP tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Langkah Perbaikan

Memuat langkah perbaikan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021– 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

- SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat kebutuhan
- MAJU** : dalam memenuhi Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- BERMARTABAT** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- PROFESIONAL** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2 Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu dan Misi Kedua berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan; dan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran dinas kesehatan
kabupaten pesisir selatan tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Formula	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan Hidup	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Kesehatan	A	A(86)	A(86)	A(87)	A(90)	A
1	Kabupaten Pesisir Selatan		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	$(\text{Jumlah Kematian ibu/Jumlah Kelahiran hidup}) \times 100.000$	$100/100.000 \text{ KH}$	$145/100.000 \text{ KH}$	$140/100.000 \text{ KH}$	$135/100.000 \text{ KH}$	$130/100.000 \text{ KH}$	$125/100.000 \text{ KH}$
				Angka Kematian Bayi (AKB)	$(\text{Jumlah Kematian bayi/jumlah kelahiran hidup}) \times 1.000$	$8/1.000 \text{ KH}$	$8/1.000 \text{ KH}$	$12/1.000 \text{ KH}$	$11/1.000 \text{ KH}$	$11/1.000 \text{ KH}$	$10/1.000 \text{ KH}$
				Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	11,60%	10,92%	11,20%	10,60%	10,60%	9,40%
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Perencanaan Dinkes tahun 2025

2.2 RENCANA KERJA

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, merupakan Tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2. 2
rencana kerja dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	-2	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	A (87)
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	93
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000K H	125
			Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	10
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persentase	6,50

Sumber : Perencanaan Tahun 2025

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Analisis Situasi: Pahami kondisi saat ini dari Dinas kesehatan, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

2. Penetapan Tujuan: Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas kesehatan yang akan membimbing penetapan target.
3. Tujuan Strategis: Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
4. Indikator Kinerja: Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan-tujuan tersebut.
5. Target Spesifik: Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.
6. Rencana Aksi: Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
7. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Tabel 2.3
sasaran strategis, indikator kinerja utama (iku) dan program pendukung dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Hasil Penilaian saat pengentrian Kriteria Inovasi pada aplikasi IGA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	(Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Kelahiran Hidup) X 100.000	1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Angka Kematian Bayi (AKB)	(Jumlah kematian / Jumlah kelahiran hidup) X 1.000	2 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Jumlah anak stunting dibagi jumlah balita yang ditimbang dan diukur x 100	3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan minuman

sumber : Perencanaan dan pelaporan Tahun 2025

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan hasil Reviu Inspektorat nomor :700.1.2.8/360/INSP/2026 tanggal 12 Maret 2026 menyatakan bahwa : terdapat sasaran “ Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja” dengan indikator sasaran “Nilai RB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” di Renstra tidak ditetapkan menjadi sasaran dan atau indicator kinerja pada dokumen PK dan LKj.

Untuk hasil reviu tersebut, dapat disampaikan bahwa berdasarkan surat Sekda nomor :050/1132.Bapedalitbang/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, yang menginformasikan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara Republik

Indonesia Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa :

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dilakukan kepada Seluruh Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan catatan hasil evaluasi dan rekomendasi Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan Reformasi Birokrasi Tematik;
3. Seluruh Perangkat Daerah tetap memberikan kontribusi dalam implementasi Reformasi Birokrasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim No. 1 Telp. 21000 – 21313 PAINAN

Painan, 25 Oktober 2023

Nomor : 050/ 1132.6 /Bapedalitbang/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Yth. Kepala Perangkat Daerah se – Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa :

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan catatan hasil evaluasi dan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan Reformasi Birokrasi Tematik;
3. Seluruh Perangkat Daerah tetap memberikan kontribusi dalam implementasi Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti hal di atas, disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk merevisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan menghapus Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (PK) tahun 2025 yang terdiri dari IKU tahun 2025 dan sasaran strategis lainnya.

Tabel 2. 4 perjanjian kinerja dinas kesehatan tahun 2025

No	Sasaran Sstrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan	A (90)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	93
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	125/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	10/1.000 KH
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,50%

Sumber : Perencanaan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, dilakukan mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5 revisi perjanjian kinerja dinas kesehatan tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	A (81)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	91
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	125/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	10/1.000 KH
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,50%

Sumber : Perencanaan Tahun 2025

Dilihat dari Tabel 2.5 di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas kesehatan oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas kesehatan, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA;
- c. Angka Kematian Ibu (AKI), target dihitung berdasarkan formulasi Jumlah Kematian ibu dibagi Jumlah kelahiran hidup di kali 100,000 Kelahiran Hidup;
- d. Angkat Kematian Bayi (AKB), target diihitung berdasarkan formulasi Jumlah kematian bayi dibagi Jumlah kelahiran hidup di kali 1.000 Kelahiran Hidup.

Tabel 2. 6
program dan anggaran dinas kesehatan
kabupaten pesisir selatan tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	A (87)	145.465.382.335
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	93	1.827.715.129
3	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	125	59.339.106.569
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB)	10	152.920.800
5	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan minuman	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,50	85.498.200
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			1.340.708.220
	Jumlah			208.211.331.253

Sumber : Perencanaan Dinas Kesehatan tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas kesehatan Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Untuk analisa atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, jika angka :

- Persentase pencapaian target kinerja dari masing-masing indikator ($\text{Realisasi/Target} \times 100\%$) untuk capaian lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik dan /atau
- $[(2 \times \text{target-realisasi}) / \text{Target} \times 100]$ untuk capaian lebih kecil menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1
klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan
Pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Sumber ; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3. 2
hasil pengukuran perjanjian kinerja eselon di dinas kesehatan
kabupaten pesisir selatan tahun 2025

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2025		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Demikratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	A (81	A(80,81)*	99,77
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	91	91	100,00
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000K H	125	11700%	106,40
	Angka Kematian Bayi (AKB)		/1.000 KH	10	13	70,00	
	Prevalensi Stunting (EPPGBM)		Persentase	6,50	6,40	101,54	
Rata-Rata Capaian							95,54

Catatan : *) Data capaian tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat, ada 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dengan target setelah revisi yaitu A (81).

Capaian untuk indikator ini adalah A (80,81) atau dengan capaian 99,77% dengan prediket **Sangat Baik**. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini menggunakan nilai Evaluasi tahun 2024 dikarenakan nilai AKIP Tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan Kinerja Tahun 2024 yang dinilai oleh Tim Inspektorat pada bulan Maret 2025.

2. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan dengan target 91.

Capaian Indikator kinerja ini adalah 91 atau sebesar 100 % dengan prediket **Sangat Baik**.

3. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan target 125/100.000 Kelahiran Hidup (KH).

Capaian Indikator ini adalah 117/100.000 KH dengan capaian 100,40%, dengan prediket **Sangat Baik**. Untuk indikator ini semakin menurun semakin bagus kinerja.

4. Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 10/1.000 Kelahiran Hidup(KH)

Capaian Indikator ini adalah 13/1.000 KH atau 70,00 % dengan prediket **Baik**.

5. Prevalensi Stunting dengan target 6,50 %.

Capaian Indikator ini adalah 6,40 % atau 101,54 % dengan prediket **Sangat Baik**.

Capaian Rata-rata seluruh Indikator Kinerja yaitu 5 (lima) indikator adalah 95,54 % dengan prediket **Sangat Baik**.

3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan**.

a. Membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun 2025

Capaian untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja ssaran strategis terrwujudnya pemerintahanyang akuntabel dan berkinerja tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	A (81)	A (80,81)*)	99,77
Rata-rata capaian (%)						99,77

Catatan : *) Data capaian tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Indikator Kinerja ini memiliki target bernilai A (81), nilai untuk evaluasi AKIP Dinas Kesehatan di dapat berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang diberikan pada bulan maret tahun 2025. Realisasi Kinerja sebesar A(80,81) atau predikat **Baik** dengan capaian untuk indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 99,77 %. Nilai ini berarti termasuk dalam kriteria **Berhasil**.

Nilai AKIP di atas didapatkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Dinas Kesehatan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan nomor 700.1.2.1/833/Insp-PS/2025 tanggal 21 Maret 2025.



Sumber :LHE Inspektorat Daerah Kab.Pesisir Selatan

- b) Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Tabel 3. 4
perbandingan realisasi indikator kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	A (86,16)	A (89,68)	A (80,81)*	A (80,81)*

Catatan : *) Data capaian tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3. 5
perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam
dokumen perencanaan strategis nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	A (80,81)	A	- *)	Akan tercapai
catatan : *) dalam Renstra hanya tertera hurur "A" tanpa angka						
sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025						

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Provinsi dan nasional (jika ada)

Untuk indikator kinerja nilai AKIP tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dinas kesehatan dengan nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja/ Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

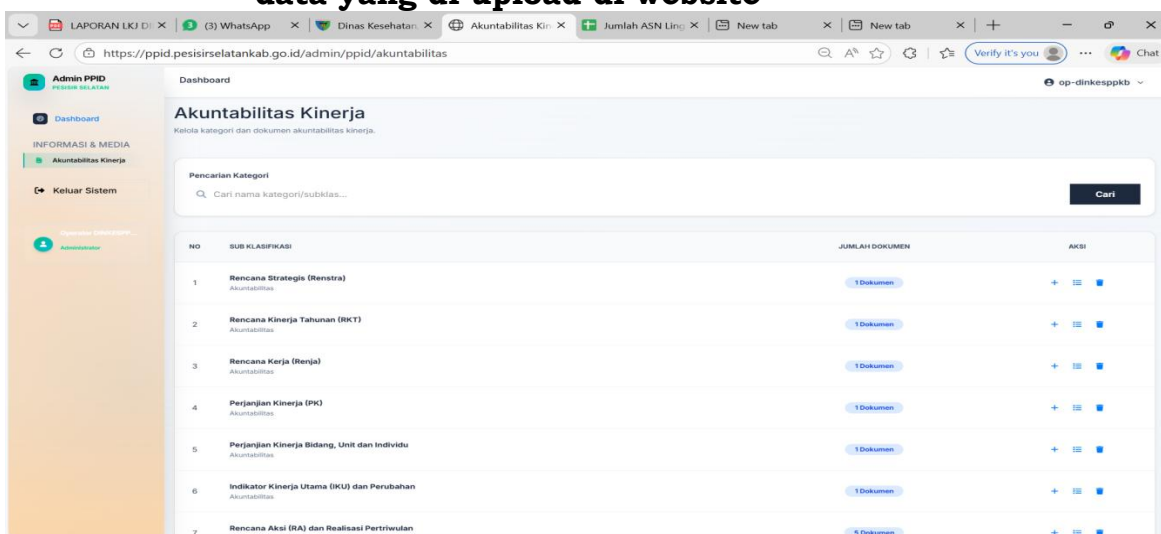
Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);

- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://dinaskesehatan.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 3. 1
data yang di upload di website



NO	SUB KLASIFIKASI	JUMLAH DOKUMEN	AKSI
1	Rencana Strategis (Renstra) Akuntabilitas	1 Dokumen	+ -
2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Akuntabilitas	1 Dokumen	+ -
3	Rencana Kerja (Renja) Akuntabilitas	1 Dokumen	+ -
4	Perjanjian Kinerja (PK) Akuntabilitas	1 Dokumen	+ -
5	Perjanjian Kinerja Bidang, Unit dan Individu Akuntabilitas	1 Dokumen	+ -
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perubahan Akuntabilitas	1 Dokumen	+ -
7	Rencana Aksi (RA) dan Realisasi Petriwilan	5 Dokumen	+ -

Sumber : Perencanaan dinas kesehatan tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment. Dinas kesehatan selama Tahun 2025 telah memberikan reward dan punishment terhadap capaian kinerja bawahan. Pemberian reward kepada petugas dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini

Gambar 3. 2
dokumentasi penyerahan penghargaan kepada pegawai berprestasi



Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan juga memberikan reward terhadap kinerja Perangkat daerah tahun 2025 yang diserahkan pada akhir 2025. Dinas Kesehatan Memperoleh Peringkat Terbaik I atas capaian pengelolaan Arsip tahun 2025 dan Terbaik I Keterbukaan Publik

Gambar 3. 3
sertifikat penghargaan tahun 2025



Gambar 3. 4
penerimaan penghargaan peringkat daerah terbaik di kearsipan
yang diserahkan oleh wakil bupati



Gambar 3. 5
penerimaan penghargaan peringkat terbaik i kualifikasi
informatif yang diserahkan oleh bupati pesisir selatan tahun 2025



3. Pelaporan Kinerja

Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian

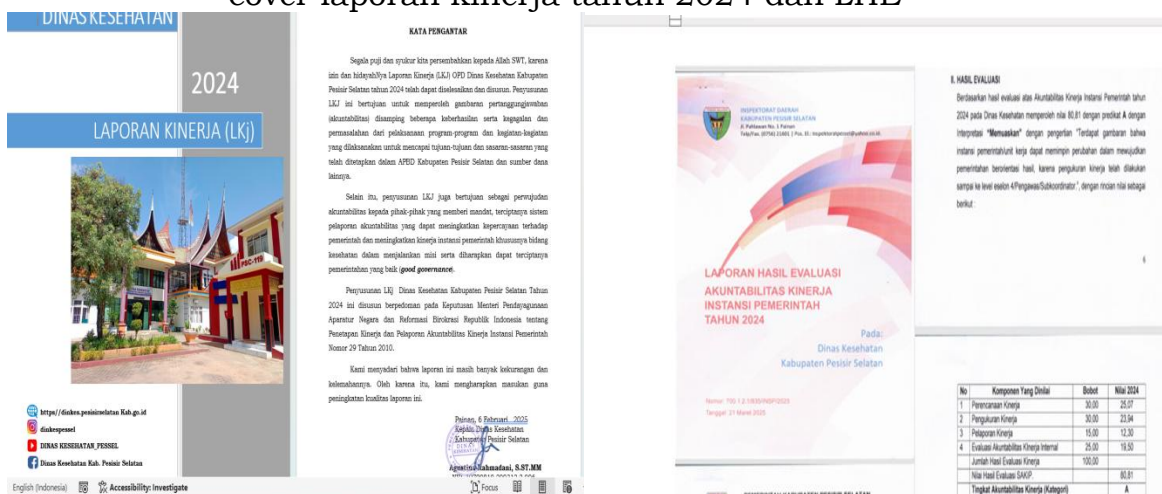
disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dan 3.7 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 3. 6
asistensi penyusunan laporan kinerja di bagian organisasi



Asistensi penyusunan laporan kinerja dan penyusunan PK

Gambar 3. 7
cover laporan kinerja tahun 2024 dan LHE



4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat

monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.8 dibawah ini :

Gambar 3. 8
rapat monitoring dan evaluasi



Semua pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten selama Tahun 2025 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Gambar 3. 9
Media sosial dinas kesehatan



Dengan memanfaatkan semua sarana publikasi yang ada terutama website dan media sosial untuk publikasi kegiatan selama Tahun 2025, Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diganjar dengan

Penghargaan Terbaik I Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada Gambar 3.10 dibawah ini :

Gambar 3.10
Penghargaan terbaik di kategori perangkat daerah "informatif"



f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Tabel 3. 6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			target	realisasi	capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	A (81)	A (80,81)*	99,77	147.293.097.464	141.044.015.946	95,76	4.02

Catatan : *) data capaian 2024

Sumber : Bagian perencanaan dan pelaporan tahun 2025

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{capaian keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Sumber: PMK No.214/PKK.02/2017

Dari perhitungan rumus di atas diperoleh Tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,02 %.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Tahun 2025 adalah A (87), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas kesehatan Tahun 2024 sebesar A (80,81) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,77%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 8,87% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar A (89,68).

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,66	25,07
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,36	23,94
3	Pelaporan Kinerja	15,00	14,03	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	23,63	19,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			89,68	80,81
			A	A

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas kesehatan Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja yaitu :

1. **Perencanaan Kinerja :**

Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi unit kerja/bidang/PD lainn yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja

2. **Pelaporan Kinerja**

Melibatkan seluruh staf/individu pada unit kerja yang mendukung dalam pemantauan capaian kinerja pada monitoring rencana aksi secara berkala per bulan/triwulan/semester sehingga setiap individu peduli atas capaian dan hasil pengukiran kinerja unit dan kinerja individu, serta melampirkan notulen, foto kegiatan

3. **Pelaporan Kinerja**

Melakukan perhitungan tingkat efisiensi sumber daya secara memadai dengan memperhitungkan antara anggaran, realisasi anggaran dan capaian keluaran.

4. **Evaluasi Kinerja**

- a. Membuat laporan evaluasi kinerja internal dengan pendalaman secara memadai yang menyajikan informasi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi/saran perbaikan
- b. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP PD, sehingga nilai SAKIP tahun berikutnya lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

Dari rekomendasi atas laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan :

Gambar 3.11
matriks tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2024

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian	Koordinator	Eviden
1.	Perencanaan Kinerja							
1	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat	Monitoring pencapaian kinerja	Data Crosscutting	1 bulan	Kepala Dinas Kesehatan	Telaah Selesai	Sekretaris Dinas Kesehatan	LHR 1 data crosscutting dg OPD
2	Pengukuran Kinerja Melibatkan seluruh staf/individu pada unit kerja yang mendukung dalam pemantauan capaian kinerja pada monitoring rencana aksi secara berkala per bulan/triwulan/semester	Menyusun pemantauan capaian kinerja secara berkala	rekap pengukuran kinerja	1 bulan	Kepala Dinas Kesehatan	Telaah Selesai	Sekretaris Dinas Kesehatan	LHR 2 Rekap pengukuran kinerja beserta lampiran
3	Pelaporan Kinerja Melakukan perhitungan tingkat efisiensi sumber daya secara memadai dengan memperhitungkan antara anggaran, realisasi anggaran dan capaian keluaran.	Menyusun penghitungan tingkat efisiensi sumber daya	Rekap penghitungan tingkat efisiensi sumber daya	1 bulan	Kepala Dinas Kesehatan	Telaah Selesai	Sekretaris Dinas Kesehatan	LHR 3. Dokumen penghitungan tingkat efisiensi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal							
a.	Membuat laporan evaluasi kinerja internal dengan pendalaman secara memadai yang menyajikan informasi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi/saran perbaikan	Menyusun Laporan evaluasi kinerja internal	Dokumen laporan	1 bulan	Kepala Dinas Kesehatan	Telaah Selesai	Sekretaris Dinas Kesehatan	LHR 4. Dokumen laporan
b.	Meningkatkan implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP PD, sehingga nilai SAKIP tahun berikutnya lebih baik dari pada tahun sebelumnya.	Tindak lanjut rekomendasi	dokumen tindak lanjut	1 bulan	Kepala Dinas Kesehatan	Telaah Selesai	Sekretaris Dinas Kesehatan	LHR 5 matrik tindak lanjut

Painan, 10 April 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Agustina R. Radani, S.S.T.M.M
NIP.19790810 200312 2 006

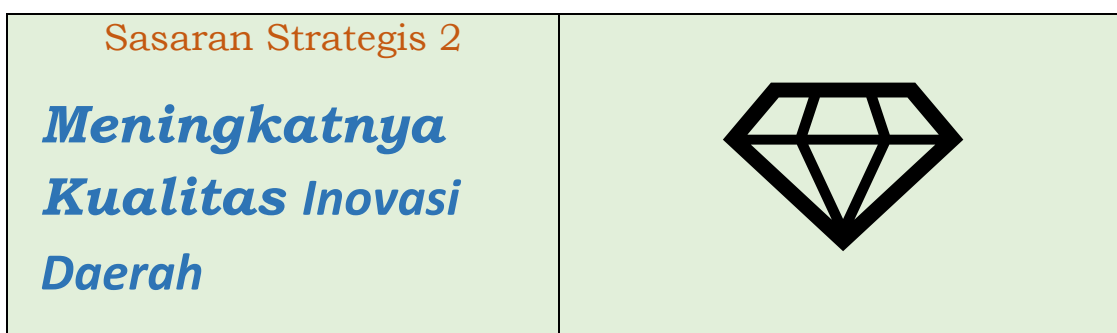
g. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Sub Kegiatan terdiri dari :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN; dan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.141.044.015.946,- atau 95,76 % dari total anggaran Rp. 147.293.097.464,-, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.249.081.518,- atau 4,24



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan.**

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2025

Tahun 2025, Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan tidak mengeluarkan inovasi baru, hanya memasukan nilai inovasi tahun 2023 yaitu 91 dari target 91 dengan capaian 100 %.

Target dan realisasi inovasi tahun 2025 dapat di lihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.7
target dan realisasi inovasi dinas kesehatan tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	91	91	100
Rata-rata capaian (%)						100

Sumber : Bidang Kesmas Tahun 2025

b. Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
perbandingan realisasi indikator kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	100	91	91	91

Sumber : Bagian Perencanaan tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	91	100	91	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Bagian Perencanaan tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas kesehatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai kematangan inovasi dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
analisis keberhasilan/kegagalan kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	Tanpa satuan	91	91	100	Capaian nilai kematangan inovasi Dinas Kesehatan 100% karena target disesuaikan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi.

Sumber : Bagian Perencanaan tahun 2025

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.11
analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			target	realisasi	capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan	91	91	100	1.827.715.129	1.494.328.838	81,76	18,24

Sumber : Bagian Perencanaan tahun 2025

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

Efisiensi =	(Pagu anggaran keluaranxcapaian keluaran)-Realisasi Anggaran Keluaran	x	100%
	Pagu Anggaranx Capaian Keluaran		

Sumber: PMK No.214/PPK.02/2017

g. Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indikator kinerja Inovasi Daerah

Program dan kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Administrasi barang milik daerah pada perangkat sub kegiatan :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
7. Penataan organisasi
- a. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Total anggaran program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator nilai kematangan Dinas Kesehatan adalah Rp. 1.827.715.129,- dengan realisasi Rp. 1.494.328.838,- atau 81,76 %. Efisiensi untuk program ini sebesar Rp. 333.386.291,- (19,24%).

Sasaran Strategis 3 MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN KELUARGA MASYARAKAT	
---	---

Untuk meIndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

I. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah : banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kematian ibu adalah; komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas; penyakit yang memperberat kehamilan, pre eklamsia atau eklamsia, perdarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan dan aborsi yang tidak aman.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko kematian ibu adalah rendahnya cakupan layanan pemeriksaan kehamilan, rendahnya cakupan layanan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan BMHP yang kurang memadai, serta faktor sosial budaya seperti pola pemikiran, keyakinan, pola hidup yang berbeda-beda. Untuk mengurangi angka kematian ibu maka pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan ibu.

Determinan factor yang dapat berkontribusi terhadap kematian ibu :

a. Aspek Kesehatan :

- Komplikasi selama kehamilan dan persalinan

- Belum optimalnya akses dan pemenuhan kebutuhan pelayanan KB dan Kespro yang berkualitas
- Masih tingginya anemia pada ibu hamil dan remaja putri

a. Aspek non Kesehatan :

- 1 dari 3 perempuan usia 15-64 mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan hidupnya.
- Masih minimnya Upaya Masyarakat dalam menghindari kehamilan tidak ideal dan beresiko
- Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait urgensi pencegahan perkawinan anak (4 terlalu 3 terlambat)
- Adanya kematian ibu juga dipengaruhi oleh ketidakadilan gender yang dialami sepanjang hidup Perempuan, seperti pola patriarki, diskriminasi, serta double dan multiple burden.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 40 Disebutkan Jika Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu, membentuk anak yang sehat, cerdas dan berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan upaya-upaya preventif berupa peningkatan cakupan layanan pemeriksaan kehamilan dengan mendekatkan akses ibu hamil terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan cakupan layanan fasilitas kesehatan, peningkatan ketersediaan obat dan BMHP, serta peningkatan edukasi dan promosi kesehatan terkait pengendalian faktor sosial budaya seperti pola pemikiran, keyakinan, pola hidup yang berbeda-beda.

$$\text{Formula} = \text{AKI} = \frac{\text{JKI}}{\text{JLH}} \times 100.000$$

AKI = Angka Kematian Ibu

JKI = Jumlah Kematian Ibu

JLH = Jumlah Kelahiran Hidup

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di beberapa Puskesmas seperti pada tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12
jumlah kematian ibu per puskesmas
kabupaten pesisir selatan tahun 2025

NO.	Puskesmas	JUMLAH KEMATIAN IBU
(1)	(2)	(3)
1	Tj Makmur	1
2	Tj. Beringin	0
3	Tapan	0
4	Ranah IV Hulu	0
5	Inderapura	0
6	Airpura	0
7	Air Haji	0
8	Balai Salasa	0
9	Kambang	2
10	Koto Baru	0
11	Surantih	0
12	Kayu Gadang	1
13	Pasar Kuok	1
14	IV Koto Mudik	0
15	Salido	1
16	Lumpo	0
17	Pasar Baru	0
18	Koto Berapak	0
19	Asam Kumbang	0
20	Tarusan	1
21	BB Belantai	1
	JUMLAH	8

Sumber : Bidang Kesmas 2025

Dari tabel jumlah kematian ibu yang ada di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun 2025 sebanyak 8 orang, terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2024v yaitu 9 orang. Kasus Kematian Ibu disebabkan :

- a. pendarahan sebanyak 1 (satu) orang,
- c. 3 (tiga) orang disebabkan oleh Hipertensi dalam Kehamilan, serta
- d. penyebab lain-lain 4 (empat) orang.
- e. Disamping adanya kasus pendarahan, hipertensi, gangguan sistem peredaran darah, sirosis hepatitis dan Infeksi paru dan penyebab lainnya, AKI pada umumnya disebabkan fasilitas kesehatan yang belum menyeluruh.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pada tahun 2025, target Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 125/100.000 Kelahiran Hidup (KH) dengan realisasi kinerja adalah 117/100.000 KH, ini

berarti bahwa Dinas Kesehatan sudah berhasil menekan angka kematian ibu karena realisasinya di bawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini juga menunjukkan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada indikator Angka Kematian ibu (AKI)

Formulasi capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)

$\frac{(2 \times \text{Target AKI} - \text{realisasi})}{\text{Target AKI}} \times 100$
--

Target dan realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
perbandingan target dan realisasi capaian
indikator sasaran strategis angka kematian ibu (aki)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 100.00 OKH	125	117	106,4
Rata-rata capaian (%)						106,4

Sumber : Bidang Kesmas 2025

Selain dengan tabel, indikator Angka Kematian Ibu dapat juga digambarkan pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1
perbandingan target dan realisasi capaian indicator
kinerja angka kematian ibu



Sumber : Bidang Kesmas 2025

- b. **Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut bahwa realisasi Angka Kematian Ibu dari tahun 2022 ke tahun 2025 terjadi penurunan yaitu dari 144/100.000 KH pada tahun 2022 turun menjadi 138/100.000 KH pada tahun 2023 dan pada tahun 2025 turun menjadi 117/100.000 KH dari 6.851 orang Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Pesisir Selatan ini berada dibawah Target AKI RPJMN Tahun 2025 yakni 183/100.000 KH . Perbandingan Angka Kematian Ibu dari Tahun 2022 s/d 2025 dapat di lihat pada tabel 3.14 di bawah ini :

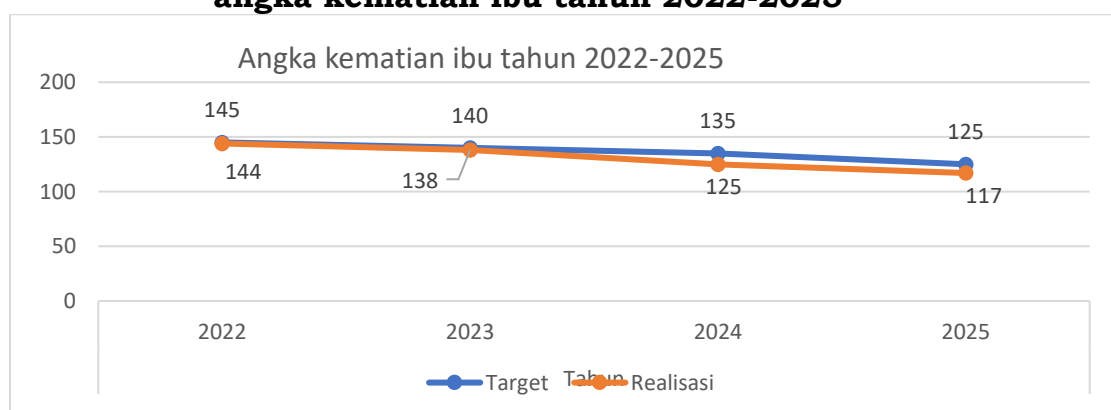
Tabel 3.14
perbandingan realisasi indikator kinerja tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	144/100.000 KH	138/100.000 KH	125/100.000/KH	117/100.000/KH

Sumber : Bidang Kesmas 2025

Perbandingan Angka Kematian Ibu diatas dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
angka kematian ibu tahun 2022-2025



Sumber : Bidang Kesmas 2025

Begitu juga jika dilihat dari jumlah ibu yang meninggal terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 12 orang pada tahun 2022 menjadi 8 orang pada tahun 2025 .

Hal tersebut di lihat pada tabel 3.15 di bawah ini :

Tabel 3.15
jumlah kematian ibu kabupaten pesisir selatan tahun 2022-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah kematian ibu			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	12	11	9	8

Sumber : Bidang Kesmas 2025

c. **Membandingkan Antara Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Strategis Organisasi**

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target realisasi Renstra dapat di lihat pada tabel 3.16 di bawah ini :

Tabel 3.16
perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	117/100.000 KH	125/100.000KH	106,4	tercapai

Sumber : Perencanaan Tahun 2025

Capaian indikator AKI masuk dalam kategori “**berhasil** ”. karena target dari indikator ini adalah penurunan angka kematian ibu. Untuk Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI), terjadi penurunan jumlah kematian ibu dari tahun 2024 yaitu dari 9 orang ibu yang mati menjadi 8 orang pada tahun

2025. Secara angka kematian dari target 125/100.000 Kelahiran Hidup, realisasi tahun 2025 adalah 117/100.000 Kelahiran Hidup (KH).

Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan target Renstra adalah realisasi kinerja di bawah target renstra yaitu 117/100.000 KH dari target renstra yaitu 135/100.000 KH.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Untuk penurunan angka kematian ibu, sudah dilaksanakan berbagai Upaya melalui program-program dan kegiatan di semua bidang, termasuk dengan melakukan inovasi dalam pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat. Inovasi yang dilakukan adalah Pasan Mandeh (tahun 2022) dan Rang Pasisie (tahun 2023).

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) tersebut merupakan hasil dari intervensi terpadu, mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga sistem rujukan. Adapun upaya utama yang dilakukan adalah:

1. Penguatan Pelayanan Antenatal (ANC) Berkualitas
 - Meningkatkan cakupan ANC minimal 6 kali sesuai standar terbaru.
 - Memastikan pemeriksaan 12 T (termasuk skrining anemia, hipertensi, dan risiko tinggi) dilakukan secara lengkap.
 - Pemanfaatan USG dasar di puskesmas, seluruh Puskesmas yang ada di kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki USG dan dokter terlatih USG.
2. Deteksi Dini dan Pemantauan Ibu Hamil Risiko Tinggi.
3. Peningkatan Kualitas dan Keselamatan Persalinan
 - Persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan kompeten.
 - Melakukan Audit kasus kematian ibu dan near miss ke Puskesmas dan Audit Kematian di Tingkat Kabupaten Bersama Tim Pengkaji sebagai bahan perbaikan layanan.
4. Penguatan Sistem Rujukan Maternal

- Optimalisasi jejaring rujukan berjenjang antara puskesmas dan rumah sakit.
- Penyediaan transportasi rujukan dan pemanfaatan call center Dimana Kabupaten pesisir Selatan punya Inovasi RANG PESISIR yang menjemput semua sasaran yang membutuhkan bantuan Transporpasi disamping Ambulance Puskesmas
- Koordinasi intensif untuk mencegah 3 keterlambatan (pengambilan keputusan, mencapai fasilitas, dan penanganan).

5. Pencegahan Penyebab Utama Kematian Ibu

- Pelatihan tenaga kesehatan terkait penanganan kegawatdaruratan obstetric, Kabupaten Pesisir Selatan Telah melatih 21 TIM PONED puskesmas yang terdiri dari dokter, Bidan dan Perawat.

6. Dengan Adanya Posyandu ILP dan Cek Kesehatan Gratis membantu program ubtuk memastikan bahwa semua sasaran sudah terpantau dan mendapatkan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat,

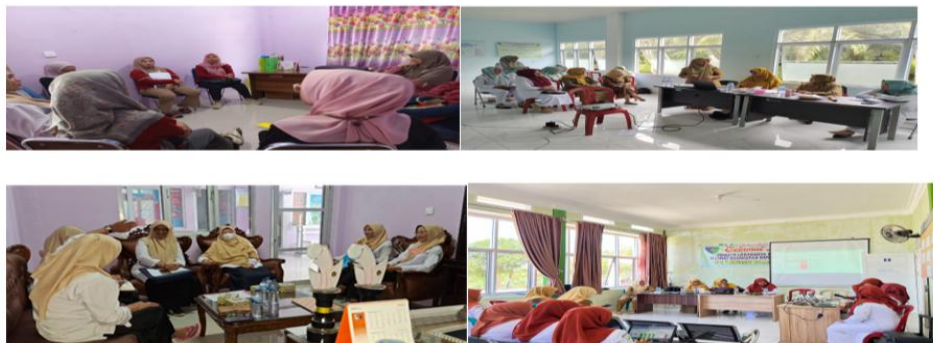
- Edukasi ibu hamil dan keluarga melalui kelas ibu hamil.
- Peningkatan peran suami dan keluarga dalam kesiapsiagaan persalinan.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Indikator KIA

8. Adanya kegiatan pendampingan Tim Ahli dokter Spesialis Anak dan Spesialis Kebidanan ke Puskesmas dengan mengadakan kegiatan berupa workshop, yang hadir sebagai pesertanya Adalah Dokter,Bidan dan Perawat yang melakukan pertolongan persalian.

Gambar 3.12
dokumentasi pelaksanaan audit kematian ibu dan bayi

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT KASUS KEMATIAN IBU DAN BAYI TAHUN 2025



Sumber : bidang kesmas tahun 2025

e. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator Angka Kematian ibu (AKI) Tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional, dapat di lihat pada tael 3.17 di bawah ini :

Tabel 3.17
perbandingan angka kematian ibu kabupaten pesisir selatan
dengan provinsi dan nasional tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000/KH	117	98	189

Sumber : Bidang Kesmas 2025

Dari tabel 3.17 di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaen Pesisir Selatan pada tahun 2025 lebih tinggi dari data Provinsi tapi secara Nasional angka kematian ibu di kabupaten Psisir Selatan di bawah lebih rendah.

Data Jumlah Kematian ibu berdasarkan puskesmas - puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2025 dapat di lihat pada tabel 3.18 :

Tabel 3.18
jumlah kematian ibu tahun 2021-2025 di kabupaten pesisir selatan

NO	PUSKESMAS	jumlah kematian ibu				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Barung2 Balantai	1	1	1	0	1
2	Tarusan	1	0	1	0	0
3	Pasar Baru	1	0	1	0	0
4	Koto Berapak	0	0	1	0	0
5	Asam Kumbang	0	0	0	0	0
6	Salido	2	0	0	0	0
7	Lumpo	0	0	0	2	0
8	Pasar Kuok	0	0	0	0	0
9	IV Koto Mudik	0	0	0	1	2
10	Surantih	1	0	3	0	0
11	Kayu Gadang		0	1	0	0
12	Kambang	0	1	0	0	1
13	Koto Baru	1	0	0	0	1
14	Balai Selasa	2	1	1	0	0
15	Air Haji	3	3	0	0	1
16	Airpura	0	0	2	0	0
17	Inderapura	1	2	0	1	0
18	Tapan	0	1	0	3	0
19	Ranah Ampek Hulu	1	2	0	0	0
20	Tanjung Beringin	0	0	0	1	1
21	Tanjung Makmur	0	1	0	1	1
	JUMLAH	14	12	11	9	8

Sumber : Bidang Kesmas 2025

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{capaian keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

Sumber: PMK No.214/PKK.02/2017

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.19
Analisis atas efisiensi sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			target	realisasi	capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	117/100.000 KH	125/100.000KH	106,4	60.918.233.789	58.203.641.079	95,54	10,2

Sumber : Bagian Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Indikator Angka Kematian Ibu ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan, program sediaan farmasi dan program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan dengan anggaran Rp. 60.918.233.789,- dengan realisasi Rp. 58.203.641.079,- (95,54 %). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 106,40%, maka berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini sebesar 10,20%.

g. Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indikator kinerja Angka Kematian Ibu

Indikator Angka Kematian Ibu ditunjang oleh Program :

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat , dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Penyediaan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kab/Kota, sub kegiatan terdiri dari :
 1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 3. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 6. Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya
- B. Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota, sengan sub kegiatan terdiri dari :
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi
 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV
 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana
 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olah raga
 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional
24. Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat
25. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
29. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
30. Pengelolaan Layanan Imunisasi
31. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
- C. Penyelenggaraan SIK secara terintegrasi, dengan sub kegiatan
 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- D. Penerbitan izin rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
 1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.
- II. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan psm dan lintas sektor tingkat daerah, dengan sub kegiatan :
 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - B. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
 2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - C. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (ukbm) tk. daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Kesehatan.
- III. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan kegiatan:
- A. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot), dengan sub kegiatan :
 1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot);
 2. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.
 - B. Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (tpm) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam), dengan sub kegiatan :
 3. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- IV. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. dengan kegiatan:
- A. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota, dengan sub kegiatan :
 1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
 3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - B. Pengembangan mutu peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah, dengan sub kegiatan :
 1. Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

C. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.

Anggaran Rp. 60.918.233.789,- dengan realisasi Rp. 58.203.641.079,- atau capaian 95,54 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan progam dan kegiatan Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.714.592.710,- atau 4,46 %.

2. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan reproduksi. Faktor-faktor yang berkontribusi pada kematian bayi yaitu; tingkat pendidikan ibu, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, kondisi ibu saat hamil, bersalin, dan perawatan bayi baru lahir. Untuk mengurangi tingkat kematian bayi dapat dilakukan dengan upaya-upaya seperti memastikan setiap ibu hamil dapat menjaga kesehatannya selama sebelum, pada saat dan pasca persalinan, menyediakan sanitasi yang layak dan aman, menyediakan akses air minum bersih, melakukan imunisasi.

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel 3.20
Angka kematian bayi kabupaten pesisir selatan tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1.000 KH	10	13	70,00
Rata-rata capaian (%)						70,00

Sumber : bidang Kesmas tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa terjadi peningkatan Angka kematian bayi pada tahun 2025 yaitu 13/1.000 Kelahiran hidup dari target 10/1.000 Kelahiran hidup.

Formulasi penghitungan angka kematian bayi ini adalah sebagai berikut :

Formulasi Indikator angka kematian bayi :

$$\frac{\text{jumlah kematian bayi}}{\text{jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$$

Formulasi capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB)

$$\frac{(2 \times \text{Target AKB} - \text{realisasi})}{\text{Target AKB}} \times 100$$

Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 tersebar di beberapa Puskesmas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21
jumlah kematian bayi per puskesmas kabupaten
pesisir selatan tahun 2025

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BAYI
1	2	3	18
1	Silaut	Tanjung Makmur	3
2	Lunang	Tanjung Beringin	9
3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	4
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Ranah IV Hulu	7
5	Pancung Soal	Inderapura	9
6	Airpura	Airpura	3
7	Linggo Sari Baganti	Air Haji	5
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	7
9	Lengayang	Kambang	4
		Koto Baru	2
10	Sutera	Kayu Gadang	4
		Surantih	10
11	Batang Kapas	Pasar Kuok	3
		IV Koto Mudik	1
12	IV Jurai	Salido	9
		Lumpo	1
13	Bayang	Pasar Baru	2
		Koto Berapak	2
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	0
15	Koto XI Tarusan	Tarusan	6
		BB Balantai	0
JUMLAH (KAB/KOTA)			91
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)			13,0

Data tabel diatas menunjukkan bahwa kematian bayi terbanyak terdapat di Puskesmas Surantih Kecamatan Sutera yaitu 10 (sepuluh) orang, Salido Kecamatan IV Jurai, Inderapura kecamatan Pancung Soal dan Tanjung Beringin kecamatan Lunang sebanyak 9 (sembilan) orang, kemudian Ranah IV Hulu Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir 7 (tujuh) orang.

Dari 91 bayi yang meninggal, penyebabnya antara lain BBLR, Asfiksia, Sepsis, Kelainan Bawaan, Kelainan saluran cerna, dan lainnya.

b. Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian indikator Kinerja Angka Kematian Bayi Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 s/d 2025 adalah sebagai berikut :

Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2025 yaitu 13 per 1.000 kelahiran Hidup (KH) dari target 10/1.000 KH. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu 10/1.000 KH dari target ABK 11/1.000 KH

Tabel 3.22
Angka kematian bayi kabupaten pesisir selatan tahun 2022-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	12	11	10	13

Sumber : bidang kesmas tahun 2025

c. Membandingkan Antara Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2025

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target Renstra dapat di lihat pada tabel 3.23. di bawah ini :

Tabel 3.23
perbandingan realisasi indikator kinerja tahun lalu
dan beberapa terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	13/1.000 KH	11/1.000KH	70,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : bidang kesmas tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa capaian kinerja dinas kesehatan tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra menggambarkan pencapaian kinerja kurang baik karena masih belum bisa menurunkan angka kematian dari target Renstra 11/1.000 KH.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Peningkatan Angka Kematian Bayi dari 10 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025 disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya kelengkapan sarana prasarana gawat darurat neonatal serta obat dan BMHP baik di BPM, Puskesmas dan Rumah Sakit seperti Neo-T dan C-Pap untuk resusitasi Bayi Baru Lahir. Maka untuk itu diharapkan BPM, Puskesmas dan Rumah Sakit untuk menindak lanjuti.
2. Masih kurangnya kompetensi dan update skill dan wawasan tenaga medis dan paramedis dalam penanganan kasus obstetri ginekologi. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah agar melakukan peningkatan kapasitas petugas PONED di puskesmas dan Ponек di Rumah sakit.
3. Adanya peningkatan persalinan dengan Sectio Caesarea (SC) di usia kehamilan < 37 minggu yang berpotensi meningkatkan risiko kelahiran prematur dan komplikasi neonatal.

Sebagai upaya menekan peningkatan Angka Kematian Bayi, Dinas Kesehatan telah dan akan terus melakukan berbagai langkah strategis, antara lain :

1. penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal
2. pemenuhan bertahap sarana prasarana kegawatdaruratan neonatal
3. peningkatan ketersediaan obat dan BMHP esensial, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan PONED dan PONEK.
4. Dilakukan penguatan koordinasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor guna memastikan kesinambungan pelayanan dari tingkat dasar hingga rujukan.

Ke depan, diharapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik BPM, Puskesmas, maupun Rumah Sakit, dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta menerapkan standar pelayanan secara konsisten. Dengan dukungan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Angka Kematian Bayi dapat kembali ditekan secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga kualitas hidup bayi dan derajat kesehatan masyarakat dapat terus meningkat.

e. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2025 dengan Provinsi dan Nasional, dapat di lihat pada tael 3.24 di bawah ini :

Tabel 3.24
perbandingan angka kematian bayi kabupaten
pesisir selatan dengan provinsi dan nasional tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	13	10,6*)	15,06

*) angka tahun 2024, karena data tahun 2025 belum rilis
Sumber : bidang Kesmas tahun 2025

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

Efisiensi =	(Pagu anggaran keluaranxcapaian keluaran)-Realisasi Anggaran Keluaran	x	100%
	Pagu Anggaranx Capaian Keluaran		

Tabel 3.25
analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
			target	realisasi	capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	10/1.000 KH	13/1.000 KH	70	60.918.233.789	58.203.641.079	95,54	-36,49

Sumber : perencanaan dan pelaporan tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat di lihat Tingkat efisiensi sumber daya adalah -36,49 %, karena capaian indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) hanya 70 %.

g. Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indicator kinerja Angka Kematian Bayi

Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) ditunjang oleh Program :

I. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat , dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Penyediaan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kab/Kota, sub kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

3. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 6. Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya
- B. Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota, sengan sub kegiatan terdiri dari :
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi
 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV
 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana
 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olah raga
 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional
24. Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat
25. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
29. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
30. Pengelolaan Layanan Imunisasi
31. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
- C. Penyelenggaraan SIK secara terintegrasi, dengan sub kegiatan
 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- D. Penerbitan izin rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
 1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.
- II. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan psm dan lintas sektor tingkat daerah, dengan sub kegiatan :
 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - B. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
 1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- C. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tk. daerah kab/kota, dengan sub kegiatan :
 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Kesehatan.
- III. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan kegiatan:
 - A. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot), dengan sub kegiatan :
 1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot);
 2. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.
 - B. Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (tpm) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam), dengan sub kegiatan :
 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- IV. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. dengan kegiatan:
 - A. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia untuk UKP dan UKM di wilayah kab / kota, dengan sub kegiatan :
 1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
 3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - B. Pengembangan mutu peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah, dengan sub kegiatan :

1. Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- C. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
 1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.

Anggaran Rp. 60.918.233.789,- dengan realisasi Rp. 58.203.641.079,- atau capaian 95,54 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan progam dan kegiatan Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.714.592.710,- atau 4,46 %.

3. **Prevalensi Stunting**

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya akibat dari kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan faktor lingkungan. Prevalensi stunting mencerminkan keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu disebuah daerah. Stunting pada anak-anak disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis dan penyakit berulang yang berkaitan dengan latar belakang sosial dan ekonomi buruk.

Gejala dan dampak stunting meliputi tinggi badan anak lebih pendek dari standar usia, resiko penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung koroner, gangguan perkembangan otak, kekebalan tubuh melemah dan kesulitan belajar.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja prevalensi stunting adalah:

$$PAB(2)SPstunting = \frac{JPKKJAB(2)SP\ stunting}{JAB(2)} \times 100\%$$

PAB(2)Pstunting : prevalensi anak baduta pendek stunting

JAB(2) : Jumlah anak baduta sangat pendek

a. **Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2025**

Target prevalensi stunting tahun 2025 adalah 7 %, dan realisasinya adalah di bawah target yaitu 6,56 %. Hal ini menunjukkan peningkatan

kinerja Dinas Kesehatan karena dapat menurunkan angka prevalensi Stunting pada tahun 2025 di bawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pencapaian Kinerja dalam hal target ini adalah semakin menurun realisasinya semakin baik kinerja.

Target dan realisasi prevalensi Stunting tahun 2025 dapat di lihat pada tabel 3.26 di bawah ini :

Tabel 3.26
target dan realisasi prevalensi stunting tahun 2025
kabupaten pesisir selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persentase	6,5	6,4	101,54
Rata-rata capaian (%)						101,54

Sumber : Bidang Kesmas tahun 2025

b. Membandingkan Antara Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Angka prevalensi stunting menurut pengukuran langsung (EPPGBM) tahun 2025 adalah 6,40% menurun dibandingkan tahun 2024. Angka prevalensi stunting adalah Tahun 2023 dan tahun 2024 adalah 7 %. Prevalensi stunting menurut pengukuran melalui aplikasi Sigizi (EPPGBM) tahun 2025 adalah 6,56 % menurun sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 7 %.

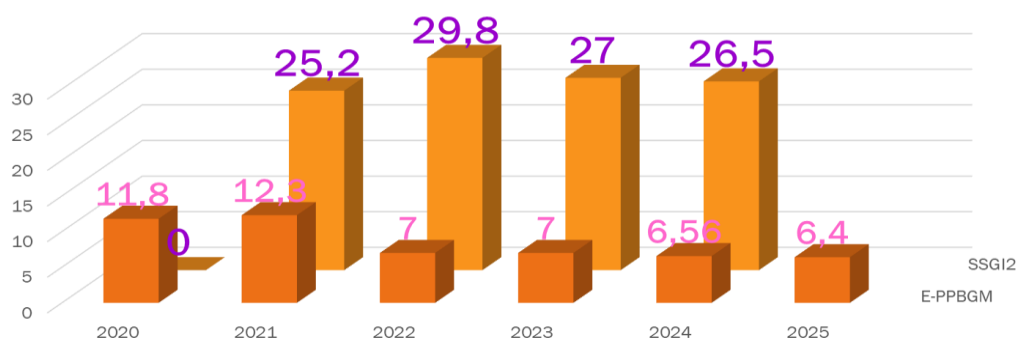
Capaian prevalensi stunting dapat dari tahun 2022 s/d 2025 dapat di lihat pada tabel 3.27 di bawah ini :

Tabel 3.27
prevalensi stunting kabupaten pesisir selatan tahun 2022-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	7	7	6	6,4

Sumber : Bidang Kesmas tahun 2025

Gambar 3.13
prevalensi stunting kabupaten pesisir selatan tahun 2020-2025



Tabel 3.28
trend prevalensi stunting per kecamatan tahun 2023-2025

TREND PREVALENSI STUNTING PER KECAMATAN KABUPATEN PESIR SELATAN						
NO	KECAMATAN	PREVALENSI STUNTING				
		2023	2024	TREN	2025	TREN
1	KOTO XI TARUSAN	11.15	11.51	↑	10.4	0.36 ↓
2	BAYANG	4.58	7.4	↑	5.5	1.9 ↓
3	BAYANG UTARA	28.38	9.6	↓	6.7	2.9 ↓
4	IV JURAI	5.13	5.54	↑	5.5	↑
5	BATANG KAPAS	8.65	6.72	↓	8.7	1.98 ↑
6	SUTERA	10.1	8.17	↓	8.4	0.23 ↓
7	LENGAYANG	6.1	4.25	↓	6.5	2.25 ↑
8	LINGGO SARI BAGANTI	8.73	7.91	↓	8	↑
9	RANAH PESIR	8.7	6.99	↓	4.6	2.39 ↓
10	AIRPURA	3.32	2.54	↓	3.4	0.86 ↓
11	PANCUNG SOAL	6.86	2.52	↓	3.1	0.58 ↓
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1.99	2.9	↑	4.6	1.7 ↑
13	RANAH IV HULU	5.61	5.39	↓	2.2	3.19 ↓
14	LUNANG	2.76	4.88	↑	4.8	↑
15	SILAUT	5.45	5.15	↓	4.5	3.19 ↓
	PESISIR SELATAN	7	6,56	↓	6.4	↓

- c. **Membandingkan Antara Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Strategis Organisasi**
- Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi stunting Kabupaten Pesisirrr Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan dapat di lihat pada tabel 3.29 di bawah ini :

Tabel 3.29
perbandingan realisasi indikator kinerja target dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,4	9,4	101,54	Tercapai

Sumber : bagian perencanaan tahun 2025

- d. **Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Nasional**

Angka prevalensi stunting didapatkan dari hasil surveilans gizi pada balita usia 0-59 bulan (balita) di daerah tertentu pada waktu tertentu. Pengukuran prevalensi stunting dilakukan dalam dua metoda yaitu pertama melalui pengukuran rutin balita setiap bulannya yang dimasukkan dalam aplikasi Sigizi menu E-PPBGM oleh petugas kesehatan di puskesmas berdasarkan hasil penimbangan balita di posyandu; yang kedua adalah melalui pelaksanaan Survey Nasional yang dilaksanakan satu kali dalam setahun melalui pengukuran balita sampel berdasarkan metoda survey yang dilakukan oleh petugas survey.

Prevalensi stunting menurut pengukuran melalui aplikasi Sigizi (EPPGBM) tahun 2025 adalah 6,40 % menurun sebesar 0,10 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,50 %.

Sedangkan prevalensi stunting Kabupaten Pesisir Selatan menurut hasil survey Nasional yang bernama Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2024 yang hasilnya dirilis pada awal tahun

2025 adalah sebesar 26,5 %. Angka ini lebih rendah 0,5 poin dari hasil survey sebelumnya pada tahun 2023 melalui survey nasional Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yaitu sebesar 27 %.

Tabel 3. 30
perbandingan persentase prevalensi stunting kabupaten
pesisir selatan dengan standar provinsi dan nasional tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persentase	6,4	-	-
		Prevalensi Stunting (SSGI)	Persentase	26,5	24,9	19,8

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Penurunan angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yaitu :

1. Melengkapi antropometri sesuai standar
2. Melakukan validasi kasus
3. Pemberian makanan tambahan
4. Pemberian suplemen tadi gizi
5. Edukasi gizi

Gambar 3.14
dokumentasi pelaksanaan evaluasi kasus stunting tahun 2025



Sumber : bidang kesmas tahun 2025

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung melalui formula :

Efisiensi =	$\frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{capaian keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}}$	x	100%

Sumber: PMK No.214/PPK.02/2017

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Prevalensi stunting

Tabel 3.31
analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
			target	realisasi	capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,5	6,4	101,54	60.918.233.789	58.203.641.079	95,54	5,91

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

g. Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indicator kinerja Prevalensi Stunting

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB) serta Prevalensi Stunting adalah :

- I. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat , dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kab/Kota, sub kegiatan terdiri dari :
 1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 3. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 6. Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya
 - b) Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olah raga
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
23. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional
24. Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat
25. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

29. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

30. Pengelolaan Layanan Imunisasi

31. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok

c) Penyelenggaraan SIK secara terintegrasi, dengan sub kegiatan

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

d) Penerbitan izin rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;

2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

II. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan psm dan lintas sektor tingkat daerah, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

b) Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

c) Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tk. daerah kab/kota, dengan sub kegiatan :

2. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Kesehatan.

V. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan kegiatan:

A. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot), dengan sub kegiatan :

1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot);
 2. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.
- B. Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (tpm) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam), dengan sub kegiatan :
1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- VI. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. dengan kegiatan:
- A. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia untuk UKP dan UKM di wilayah kab / kota, dengan sub kegiatan :
1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
 3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- B. Pengembangan mutu peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah, dengan sub kegiatan :
1. Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- C. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
- Anggaran Rp. 60.918.233.789,- dengan realisasi Rp. 58.203.641.079,- atau capaian 95,54 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.714.592.710,- atau 4,46 %.

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025 terdapat pada tabel 3.32 berikut :

Tabel 3.32
anggaran dan realisasi yang menunjang sasaran strategis
dinas kesehatan tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					380.213.703.222	360.568.299.298	94,83
I	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A (81)	A(80,81)	99,77	262.074.420.487	248.309.974.555	94,75
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		148.825.006	143.533.654	96,44
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8		60.177.110	56.016.247	93,09
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12		88.647.896	87.517.407	98,72
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100		145.316.557.329	139.406.153.456	95,93
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.200	1.190		144.913.919.247	139.039.718.148	95,95
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12		323.493.428	293.618.380	90,76
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12	12		79.144.654	72.816.928	92,00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91	91	100	1.664.579.581	1.385.943.350	83,26
5		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				132.744.000	126.551.997	95,34
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	12		96.017.000	95.732.122	99,70
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12		36.727.000	30.819.875	83,92
6		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				132.248.518	79.382.900	60,03
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	50	50		54.700.518	48.132.900	87,99
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	12		77.548.000	31.250.000	40,30
7		Administrasi Umum Perangkat Daerah				263.487.506	230.318.751	87,41
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	15	15		13.028.067	11.658.500	89,49
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	3		41.204.310	39.046.500	94,76
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	6		25.001.067	22.744.081	90,97
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	3		5.400.000	4.650.000	86,11
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		34.505.000	31.587.600	91,54
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	105		101.856.500	88.983.070	87,36
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	60		42.492.562	31.649.000	74,48
8		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				248.464.050	164.302.098	66,13
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	16	16		248.464.050	164.302.098	66,13
8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				499.189.810	394.808.356	79,09
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	24	24		262.489.936	184.488.356	70,28
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12		236.699.874	210.320.000	88,86
9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				520.694.215	469.962.148	90,26
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan dinas jabatan	1	1		39.190.000	30.379.350	77,52
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	20	20		235.293.415	203.104.298	86,32
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	20		13.000.000	11.750.000	90,38
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	1	1		230.210.800	224.728.500	97,62
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5	-		3.000.000	-	-
10		PENATAAN ORGANISASI				30.887.030	29.002.686	93,90
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	12		30.887.030	29.002.686	93,90

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	125/100.000 KH	117/100.000 KH	106,40	116.362.927.090	110.830.303.124	95,25
			10/1.000 KH	13/1.000 KH	70			
			6.50 %	6.40 %	101,54			
11		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				58.139.796.346	55.734.662.873	95,86
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16	16		18.583.133.210	18.500.802.014	99,56
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1		5.816.973.675	5.345.369.563	91,89
		Pengembangan Rumah Sakit	1	1		4.426.222.900	4.147.927.626	93,71
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	12		1.403.077.455	1.317.010.605	93,87
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20	20		12.817.517.426	12.125.944.721	94,60
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	15	15		305.022.200	286.228.045	93,84
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, ,	12	12		14.650.138.048	13.912.227.144	94,96
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	80	80		34.786.700	13.906.700	39,98
		Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	21	21		102.924.732	85.246.455	82,82
12		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				58.000.365.546	54.902.837.227	94,66
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.494	6.494		946.757.640	956.412.820	101,02
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.474	6.474		213.198.540	181.721.565	85,24
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	6.526	6.526		18.559.885	14.031.262	75,60
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	36.168	36.168		49.007.100	39.693.316	81,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	57.062	57.026		853.897.750	758.379.570	88,81
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	137.511	137.511		161.825.300	123.477.850	76,30
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	55.495	55.495		147.979.850	129.133.229	87,26
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	40.648	40.648		51.529.600	40.707.500	79,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	5.060	5.060		58.837.300	49.930.662	84,86
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.135	1.135		564.271.300	541.469.641	95,96
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	7.198	7.198		304.455.940	287.019.790	94,27
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	1	1		66.136.050	56.160.565	84,92
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	21	21		4.099.396.720	3.627.813.608	88,50
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	21	21		358.557.802	337.703.602	94,18
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21	21		550.740.498	495.581.303	89,98

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	12		266.880.400	252.678.963	94,68
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		7		54.200.200	30.081.300	55,50
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22	22		543.374.382	391.168.050	71,99
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100	100		151.720.000	142.720.000	94,07
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22	22		1.956.624.118	1.914.969.580	97,87
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1		35.842.895.857	35.051.247.796	97,79
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	100	100		117.375.000	80.085.800	68,23
		Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	1	1		216.621.118	182.419.185	84,21
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	5	5		75.777.484	70.298.550	92,77
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	2		492.129.635	475.762.890	96,67
		Pengelolaan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV	12	12		40.566.290	32.256.440	79,52
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	1		2.437.040.100	2.406.155.726	98,73
		Operasional Pelayanan Puskesmas	252	252		4.982.552.675	4.283.236.507	85,96
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	2.379	2.379		49.858.990	45.360.990	90,98
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	4.729	4.729		20.298.740	12.570.290	61,93
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12	12		603.720.825	540.076.162	89,46
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	32	32		368.579.700	185.420.907	50,31
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	8	8		1.048.344.250	926.522.500	88,38
		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	5	5		68.184.500	22.029.300	32,31
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	12	12		218.470.000	218.540.000	100,03
13		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara				71.918.352	70.293.084	97,74
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1		71.918.352	70.293.084	97,74
14		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				150.846.846	122.509.940	81,21
		Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	8	8		70.484.200	52.668.080	74,72
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	21	21		80.362.646	69.841.860	86,91

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	125/100.000 KH	117/100.000 KH	106,40	1.340.708.220	1.064.636.116	79,41
			10/1.000 KH	13/1.000 KH	70			
			6.50 %	6.40 %	101,54			
15		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Untuk UKP dan UKM di				235.328.300	227.713.706	96,76
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya	30	30		17.430.000	15.877.960	91,10
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	800	800		173.314.250	168.847.006	97,42
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	53	53		44.584.050	42.988.740	96,42
16		Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat				999.443.900	739.271.010	73,97
		Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	300	300		999.443.900	739.271.010	73,97
17		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				105.936.020	97.651.400	92,18
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	30	30		42.518.400	36.437.460	85,70
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga	600	600		63.417.620	61.213.940	96,53
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	125/100.000 KH	117/100.000 KH	106,40	85.498.200	72.301.130	84,56
			10/1.000 KH	13/1.000 KH	70			
			6.50 %	6.40 %	101,54			
18		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat				44.413.000	41.315.580	93,03
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha	50	50		44.413.000	41.315.580	93,03
19		Penerbitan Sertifikat Produksi IRT Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Makanan dan Minuman				31.500.200	24.750.550	78,57
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang	50	50		31.500.200	24.750.550	78,57
20		penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)				9.585.000	6.235.000	65,05
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)	35	35		9.585.000	6.235.000	65,05
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	125/100.000 KH	117/100.000 KH	106,40	350.149.225	291.084.373	83,13
			10/1.000 KH	13/1.000 KH	70			
			6.50 %	6.40 %	101,54			
21		Advokasi, pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor				24.621.750	23.052.981	93,63
		Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan	12	12		24.621.750	23.052.981	93,63
22		Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah				45.244.150	39.033.842	86,27
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	12	12		26.614.600	24.649.552	92,62
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12	12		18.629.550	14.384.290	77,21
23		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat				280.283.325	228.997.550	81,70
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	12		280.283.325	228.997.550	81,70

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 95,54 % dengan kategori sangat baik, dengan nilai tertinggi adalah 106,40 % yaitu pada sasaran meningkatnya kualitas Kesehatan keluarga Masyarakat.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan dengan target A (81).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan adalah A (80,81) atau sebesar 99.77 % dengan prediket **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan ini memakai nilai evaluasi tahun 2024 dikarenakan nilai ini diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja 2024, sementara nilai untuk laporan kinerja 2025 baru bisa didapatkan pada bulan maret 2026.

- b. Nilai Kematangan inovasi

Capaian indikator kinerja ini adalah 100 atau sebesar 100 % dengan prediket **sangat baik**.

- c. Angka Kematian ibu (AKI)

Capaian indikator kinerja ini adalah 106,40 % dengan prediket **sangat baik**

- d. Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian indikator kinerja ini adalah 70 % dengan prediket dengan prediket **baik**

e. Prevalensi Stunting

Capaian indikator kinerja ini adalah 101,54 % dengan prediket **sangat baik**

3. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang menunjang sasaran strategis tahun 2025 adalah sebesar 94,83 % dari anggaran Rp. 380.213.703.231,- dengan realisasi Rp.360.568.299.308,- yang bersumber dari DAU, DAK Fisik dan DAK Non fisik.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan maka dilakukan upaya-upaya, antara lainnya :

1. Dalam Rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain :
 - a. Intervensi prioritas untuk mengatasi penyebab utama Kematian Ibu dan bayi.
 - b. Mendorong persalinan dengan tenaga kesehatan di fasyankes.
 - c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) dan PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar).
 - d. Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan : Tenaga Nusantara Sehat, perawat, dokter Internsif (Dokter dengan Kewenangan tambahan), dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospistal).
 - e. Meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Sarana Prasarana Kesehatan.
 - f. Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Pustu (Puskesmas Pembantu), Puskesmas dan Rumah Sakit.
 - g. Memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking.

- h. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik .
- 2. Mencapai Nilai AKIP Dinas Kesehatan sesuai dengan target perlu komitmen yang serius dari seluruh jajaran Dinas Kesehatan dengan meningkatkan kualitas Kinerja dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kesehatan.